

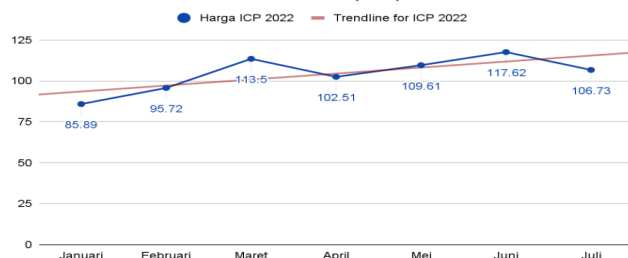
## Potensi Permasalahan BLT BBM 2022

### HIGHLIGHTS

- Konflik geopolitik Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak dunia naik dimana rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) dari Januari-Juli 2022 berada di atas US\$100/barel.
- Dengan jumlah subsidi dan kompensasi BBM yang akan melampaui anggaran Rp698 triliun hingga akhir tahun, pemerintah menaikkan harga Peralite, Pertamina, dan Solar.
- Bentuk kompensasi yang diberikan berupa BLT BBM sebesar Rp600.000 untuk empat bulan kepada 20,65 juta KPM.
- Terdapat potensi masalah yang muncul terkait penyaluran BLT karena jaraknya yang singkat antara kenaikan harga BBM dengan pemberian BLT BBM.
- Langkah pemberian BLT BBM sudah tepat, namun perlu perencanaan yang matang dalam hal sosialisasi dan skema penyaluran sehingga dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia-Ukraina berdampak pada naiknya harga minyak dunia dimana Rusia merupakan salah satu produsen utama minyak dunia sehingga mempengaruhi pergerakan harga minyak global termasuk Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. Naiknya harga minyak dunia pada tahun 2022 tercatat sebesar US\$114,55/barel menyebabkan permintaan dan penawaran tidak seimbang. Pada Januari 2022, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) ditetapkan sebesar US\$85,89/barel. Kemudian Mei 2022, ICP naik menjadi US\$109,61/barel dan terus meningkat pada bulan Juni sebesar US\$117,62/barel. Meskipun pada bulan Juli 2022 sempat terkoreksi menjadi US\$106,73/barel, ICP masih berada di atas US\$100/barel. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, pemerintah memberikan respons atas kenaikan harga minyak dunia melalui penambahan besaran subsidi dan kompensasi untuk energi. Anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi pada APBN 2022 yang sebesar Rp152,5 triliun bertambah pada APBN Perubahan 2022 menjadi sebesar Rp502,4 triliun akibat dari kuota BBM bersubsidi yang membengkak. Dari keadaan tersebut, jumlah subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melebihi batas Rp698 triliun hingga akhir tahun 2022.

Indonesian Crude Price (ICP) Tahun 2022



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2022)

Untuk mencegah semakin melonjaknya kuota BBM bersubsidi, pemerintah pada 3 September 2022, memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter untuk Peralite, Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter untuk Pertamina, dan Rp5.150/liter menjadi

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

**Pengarah :** Dr. Inosentius Samsul, S.H.,  
M.Hum.

**Penanggung Jawab:** Drs. Helmizar, M.E.

**Redaktur:** Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP,  
Orlando Raka Bestianta, S.E., Arjun Rizky  
Mahendra, SE

#### Penulis:

Padma Dewi Piranti; Antoni; Paramita  
Permata Sari; Putri Berliana Aristy; Putu Ria  
Septiani

Rp6.800/liter untuk Solar. Untuk meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diberikan mulai September hingga Desember 2022 kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah menganggarkan BLT BBM sebesar Rp600.000 untuk empat bulan yang diambil dari anggaran BLT sebesar Rp12,4 triliun. Hingga 13 September 2022, realisasi BLT BBM telah disalurkan kepada 18.776.287 KPM sebesar Rp5,63 triliun. Selain BLT BBM, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebesar Rp600.000 kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan berpenghasilan dibawah Rp3.500.000 per bulan atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Hingga 12 September 2022, realisasi BSU telah disalurkan kepada 4.361.792 pekerja sebesar Rp2,62 triliun.

Namun, dalam pelaksanaannya pemberian BLT BBM masih dihadapi oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos. Ombudsman RI mengemukakan empat permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos, yaitu alur pendaftaran yang rumit dikarenakan kurangnya informasi tentang bansos, unit pengaduan belum dikelola dengan optimal, mitra penyaluran bansos belum merata hingga wilayah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal), dan sangat singkatnya jarak waktu antara kenaikan harga BBM bersubsidi dengan pemberian BLT BBM. Peluncuran program BLT BBM dirasa sangat cepat, dimana pada 31 Agustus 2022 Presiden Jokowi melakukan penyaluran secara simbolis di Kabupaten Jayapura, Sentani kepada 100 KPM bansos dan dilanjut pada 1 September 2022 BLT BBM telah disalurkan secara bertahap.

Efektivitas penyaluran bansos perlu didukung dengan perbaikan DTKS dan sosialisasi atas program tersebut. Pemerintah mengupayakan langkah strategis dalam perbaikan penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran, seperti meng-*update* DTKS dalam tiga tahap, yaitu **pertama**, Kemensos melakukan verifikasi data pada minggu pertama dan kedua; **kedua**, melakukan pengecekan ulang pada minggu ketiga; dan **ketiga**, menetapkan nama yang menjadi penerima bansos pada minggu keempat. Dalam hal mendukung transparansi penyaluran bansos, Kemensos juga menyediakan beberapa laman, seperti *Whistleblowing System* (WBS) Kemensos, lapor.go.id, dan jaga.id.

Penyaluran BLT BBM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat miskin. Dampak positif lainnya adalah masyarakat miskin dan rentan layak mendapatkan bantuan dengan catatan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah menerapkan skema penyaluran BLT BBM dengan sistem *top-up* pada kartu yang dimiliki oleh KPM bansos, lalu dana tersebut dapat dicairkan melalui jasa penyalur, yaitu PT Pos Indonesia. Skema ini sejatinya tidak memiliki masalah, namun jasa penyalur PT Pos Indonesia perlu diberikan perhatian lebih karena meskipun PT Pos Indonesia memiliki kantor cabang hingga ke pelosok desa, tetapi tetap berpotensi menimbulkan masalah jika letak PT Pos Indonesia terlalu jauh dari wilayah sekelompok masyarakat. Masyarakat tetap tidak dapat mencairkan dana bansos, termasuk BLT BBM. Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu skema penyaluran khusus yang dipersiapkan jika suatu daerah tidak memiliki Pos Indonesia yang terjangkau, seperti di Kecamatan atau Kelurahan, pendistribusian tingkat RW, hingga skema jemput bola dimana perwakilan Pos Indonesia mendatangi rumah warga. Skema jemput bola ini sebenarnya telah dijalankan oleh PT Pos Indonesia, tetapi terbatas hanya kepada lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi mengenai syarat untuk menjadi penerima BLT BBM, tujuan, dan skema penyalurannya kepada KPM. Kemensos dapat bekerja sama untuk pembaruan DTKS dengan Tim SDGs Desa Binaan, Dukcapil dari Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengetahui kondisi dan kelayakan masyarakat apakah sesuai kriteria atau tidak sebagai KPM sehingga proses penyaluran BLT BBM dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.